



**PEMERINTAH
KOTA PALU**

**#PaluMantap
Bergerak**

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA PALU TAHUN 2024



H. HADIANTO RASYID., S.E
Wali Kota Palu

dr. RENY A. LAMADJIDO., Sp.PK., M.Kes
Wakil Wali Kota Palu



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA PALU TAHUN 2024

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Palu pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,71	84,12	0,48978
2.	Angka Kemiskinan	6,56	5,94	-9,45121
3.	Angka Pengangguran	5,65	5,63	-0,35398
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,96	4,61	-7,05645
5.	Pendapatan Perkapita	79.452.380	83.867.920	5,55746
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,324	0,337	4,01234

Sumber data: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2025

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya:

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kota Palu pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	68,1090734	70,5219292
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	96,7598942	98,638946
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	103,3565329	98,2778133
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesenjangan	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp. 444.796.437.071,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kesenian
2. BPJS Gratis Warga Tidak Mampu
3. Reward Sebesar 2 Milyar Bagi SD dan SMP Berprestasi
4. Percepatan Peningkatan Persamaan Kualitas Sd Dan Smp Se-Kota Palu
5. Update Berkala Kompetensi, dan Kapasitas Guru/Pengajar
6. Kepala Sekolah Magang
7. Pelestarian Seni Budaya

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sehingga terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS) yang belum terdata.
2. Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapodik secara berkala.



3. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia
4. Belum ada SOP di Tingkat Kota tentang pelaksanaan penerapan SPM.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Palu pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk (Per 1.000 Penduduk)	4,6953215	4,6056124
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	100	100
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	97,6028294
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100	100
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	99,4073489
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	99,3557978	98,4036391
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83,072793	87,6799378
8	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	77,1191625	87,1264846
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	78,6302272	90,6014809
10	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan	100	100



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
11	Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100
12	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100	100
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	100	100,4703566
14	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp. 156.827.881.739,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Palu Kota Sehat
2. Transformasi Puskesmas Menjadi Klinik Modern
3. Satu Ambulans Satu Kelurahan
4. BPJS Gratis Warga Tidak Mampu
5. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center)

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan target/sasaran yang terlalu tinggi sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019 agak sulit untuk dipenuhi mengingat harus memenuhi standar mutu pelayanan
- b. Sistem pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal dikarenakan ketepatan waktu pelaporan dari Puskesmas dan Pustu sering terlewat, dan juga pemahaman atas definisi operasional dari masing-masing indikator masih kurang
- c. Advokasi dan koordinasi lintas sektor baik level kelurahan dan kecamatan belum berjalan dengan baik



- d. Sumber daya manusia kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas masih belum cukup untuk memenuhi standar mutu pelayanan Kesehatan
- e. Masih kurangnya peran serta masyarakat khususnya kader Kesehatan dalam mendukung pencapaian sasaran pelayanan Kesehatan yang ingin dicapai
- f. Masih kurangnya pemenuhan BMHP untuk pelayanan Kesehatan sesuai standar

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kota Palu pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	0 (Surat Keterangan Bukan Kewenangan Pemerintah Kota Palu)	0 (Surat Keterangan Bukan Kewenangan Pemerintah Kota Palu)
2	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kota	0 (Surat Keterangan Bukan Kewenangan Pemerintah Kota Palu)	0 (Surat Keterangan Bukan Kewenangan Pemerintah Kota Palu)
3	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	51,2095361	64,4267851
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota	94,5314458	96,1745298
5	Persentase Jumlah Rumah Yang Memperoleh Layanan	72,5239487	74,4605585



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	Pengolahan Air Limbah Domestik		
6	Rasio kepatuhan PBG kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	73,049963	74,05089
8	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	65,8436214	61,7594255
9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp. 206.565.016.054,- dan Realisasi belanja Urusan Penataan Ruang di Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp. 6.548.412.138,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Kawasan Ekonomi Kreatif Dan Wisata Religi
2. Revitalisasi Pasar Berbasis Segmentasi
3. Bangun Palu Tahan Gempa
4. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
5. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu
6. Ruang Terbuka Hijau/Public Area Per Kecamatan
7. Pembangunan Gedung Kesenian
8. Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikasi Perkelurahan
9. Palu Adipura
10. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center)
11. Palu Tahan Gempa

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Air Minum

- Belum semua kawasan rawan air bersih/minum terbangun infrastruktur SPAM dikarenakan keterbatasan anggaran
- Pengelolaan SPAM yang dikelola oleh masyarakat tidak efektif dan tidak terkelola dengan baik



- Penanganan SPAM Perpipaan terdapat dua Lembaga (PDAM Kota Palu dan PDAM Donggala) di Kota Palu yang belum terintegrasi dalam penanganan sistim perpipaan
- Tingkat kepedulian masyarakat dalam pemakaian air melalui SPAM yang dikelola oleh masyarakat sangat kurang
- Masih adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku yang disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih maupun karena kendala administratif wilayah serta Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara sarana yang telah terbangun.
- Wilayah administrasi antara kabupaten dan Kota Palu sering menjadi hambatan dalam pengambilan sumber air, karena potensi sumber air baku berada di luar Wilayah Kota Palu.

b. Pengelolaan Limbah Domestik

- Kesadaran masyarakat sangat rendah dalam pemahaman penyedotan limbah
- Masih terdapat tampungan limba masyarakat yang tidak sesuai standar, sehingga tidak dapat dilakukan penyedotan.
- Kurangnya sosialisasi terkait pemahaman sistim pengelolaan limba domestik
- Infrastruktur penegelolaan Limbah Domestik masih belum memadai
- Pemeliharaan kendaraan yang kurang maksimal

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kota Palu pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	100	0 (Surat Keterangan)
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	0 (Surat Keterangan)	0 (Surat Keterangan)
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kota Yang Ditangani	59,1211018	66,0449582



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,9199418	1,634061
5	Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	26,9951632	10,1320977

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp. 67.083.031.738,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. 4 Miliar Untuk Bedah Rumah + Modal Usaha
2. Bangun Palu Tahan Gempa
3. Palu Kota Sehat
4. Palu Terang

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Belum adanya rencana aksi dalam penentuan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya di kota Palu sehingga jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah belum dapat dilaksanakan

5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Palu pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100



No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	94,3699732	98,0237154
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,4	8,04

B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Polisi Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp. 27.338.225.926,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/ Command Center)

Realisasi belanja Urusan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp. 5.513.871.706,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Bangun Palu Tahan Gempa
2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
3. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center)

Realisasi belanja Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp. 10.805.057.496,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center)

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai.

2. Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal
3. Kebutuhan Pemenuhan Anggaran
4. Belum Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana
5. Adanya Proses perubahan anggaran
6. Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
7. Sarana dan Prasarana yang dimiliki kurang memadai dalam pelayanan evakuasi
8. Kemampuan Personil dalam kualitas dan kualitatif masih kurang
9. manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Palu pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	11,9972261
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp. 17.344.895.542,- dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. 4 Miliar Untuk Bedah Rumah + Modal Usaha
2. Penguatan Umkm
3. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
4. Bpjs Gratis Warga Tidak Mampu



5. Palu Berbagi
6. Palu Ramah Difabel
7. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center)

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kota Palu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada sub kegiatan permakanan dibayarkan sesuai kebutuhan PPKS (PPKS yang meninggal dunia sejumlah 2 orang)
2. Komisi Daerah (KOMDA) Lanjut usia tidak ada berdasarkan Kepres Tahun 2020 tentang Pembubaran Lansia karena telah dialihkan pada Hari Lanjut Usia (HILUN) di kota Palu

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 belum dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya Berdasarkan Laporan Nomor 02.A/LHP/XIX.PLU/5/2024 Kota Palu berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2023, yang berarti laporan keuangan tersajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Palu tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palu (*Unaudited*) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kota Palu Tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 1.590.218.616.623,07 atau 87,65% dan Realisasi Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2024 mencapai Rp. 1.607.254.821.999,50 atau 87,55%.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :



Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	534.606.500.974,00	366.637.272.204,07	68,58
4.2	Pendapatan Transfer	1.256.399.943.003,00	1.211.098.478.867,00	96,39
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.305.051.452,00	12.482.865.552,00	53,56
Pendapatan Daerah		1.814.311.495.429,00	1.590.218.616.623,07	87,65

Belanja Daerah

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1	Belanja Operasi	1.473.411.367.449,31	1.307.845.757.929,50	88,76
5.2	Belanja Modal	361.575.616.149,99	299.363.085.070,00	82,79
5.3	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	45.979.000,00	6,13
Belanja Daerah		1.835.736.983.599,30	1.607.254.821.999,50	87,55

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah, Kota Palu memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	DINAS SOSIAL	Rumah Singgah Nompeili Ntodea	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau disingkat menjadi PPKS, sesungguhnya mereka adalah masyarakat yang tersisihkan dan termarginalkan dari perlakuan kasih sayang, karena kebanyakan dari mereka harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan sangat tidak bersahabat untuk mereka. Mereka harus bertahan hidup dengan cara-cara yang kurang atau bahkan tidak dapat diterima oleh masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Merekapun sering dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor,



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			sehingga yang namanya razia atau disebut dengan penjangkauan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka. PPKS merupakan komunitas yang paling beresiko mengalami kegagalan dalam hidup mereka, dikarenakan permasalahan ekonomi, ditelantarkan keluarga, dan lain-lain. Peran serta pemerintah dalam menuntaskan permasalahan tersebut yaitu dengan memberikan perlindungan dan pembinaan/rehabilitasi terhadap PPKS melalui dinas Sosial Kota Palu. Berikut adalah fenomena masalah yang terjadi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Palu yang diantaranya yaitu sebagai berikut: 1. Tidak adanya tindak lanjut setelah dilakukannya razia atau disebut dengan penjangkauan. Seharusnya setelah penjangkauan para PPKS diberikan pembinaan dan perlindungan. 2. Belum adanya sarana dan prasarana untuk memberikan pembinaan dan pelatihan/rehabilitasi, yaitu Rumah Singgah. 3. Dinas Sosial Kota Palu ternyata masih kekurangan SDM dalam pengentasan permasalahan PPKS. Keberadaan rumah singgah sangat penting, berbagai perubahan terjadi pada anak jalanan di rumah singgah, baik perubahan yang berhubungan dengan kondisi fisik maupun berhubungan dengan kondisi lingkungan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak jalanan dipengaruhi oleh apa yang mereka terima di rumah singgah. Begitupun apabila Kota Palu mempunyai rumah singgah tentunya dapat berpengaruh baik terhadap PPKS yang nantinya mengalami banyak perubahan baik. Maka dari itu peran penting dari rumah singgah sangatlah dibutuhkan untuk PPKS agar dapat mengembalikan fungsi sosial PPKS. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Sosial Kota Palu pada bulan Oktober 2020 telah membentuk sebuah Rumah Singgah Nompeili Ntodea yang merupakan suatu wahana dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis, anak terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar dan orang



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			terlantar. Secara harfiah arti kata Nompeili Ntodea mempunyai arti peduli terhadap sesama. Berdasarkan SOP Rumah Singgah Nompeili Ntodea pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis, anak terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar selama 7 (tujuh) hari. Adapun Pelayanan dalam Rumah Singgah Nompeilei Ntodea, yaitu: - Pelayanan Data; - Pelayanan makanan dan sandang; - Pelayanan Psykosial; - Pelayanan Reunifikasi dan penjangkauan. Dengan adanya Rumah Singgah Nompeili Ntodea, Pemerintah Daerah harus memperhatikan persolaan lanjutannya, yaitu dengan membuat program-program yang dapat diterima dengan baik oleh PPKS. Pembinaan akhlak yang diberikan kepada anak-anak jalanan diantaranya akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap sesama. Adapun metode yang digunakan dalam pembinaan akhlak tersebut adalah metode nasihat, metode teladan, metode pembiasaan dan metode imbalan dan ancaman. Kendala utama yang dihadapi dalam pembinaan akhlak bagi anak jalanan ini adalah sulitnya mengatur anak jalanan yang cenderung berwatak keras. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memasuki dunia mereka, agar mereka merasa nyaman dengan pembina. Hasil pembinaan akhlak tersebut dapat dilihat dari perubahan yang signifikan dari pengetahuan dan perilaku mereka yang lebih baik. Dalam skripsi tersebut bisa dilihat bahwa pentingnya komunikasi dan pengetahuan dalam pemberian pembinaan terhadap anak jalanan agar diterima dengan baik oleh anak jalanan sehingga membuahkan hasil yang baik.
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Keliling Layanan di Sekolah Gratis (KALEDO Gratis)	Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Namun



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			pada tahun 2021 tingkat cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak seperti Akta Lahir, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Pengenal elektronik (KTP-el) masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari laporan bulanan evaluasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan cakupan kepemilikan akta lahir bagi anak 0-17 tahun 90,67%, Kartu Identitas Anak : 35,70% dari target nasional 40%, perekaman usia 17 tahun : 109,64%, dan penerbitan KTP-el : 99,89%. Persentasi kepemilikan dokumen kependudukan yang dianggap masih kurang, merupakan salah satu hambatan bagi pelayanan prima yang menjadi tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saat ini seluruh aktifitas pelayanan publik, alokasi anggaran, pesta demokrasi, bahkan pencegahan tindak criminal telah menggunakan data kependudukan yang berasal dari Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kehadiran Dukcapil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi semua pihak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah mengembangkan Ide terkait percepatan pelayanan bagi anak usia sekolah. Inovasi KALEDO GRATIS adalah Keliling Layanan di Sekolah Gratis.. layanan ini bersifat mobile langsung ke sekolah-sekolah baik di Paud/TK, SD, SLTP/SMP, SMA/SLTA yang melayani seluruh anak di sekolah khusus penerbitan Akta Lahir, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak bagi anak dibawah 17 tahun, Perekaman KTP elektronik bagi anak 16 tahun ke atas, dan Pencetakan KTP-el bagi anak 17 tahun ke atas. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi anak-anak usia sekolah, dimana anaka-anak pada masa pembelajaran memiliki waktu yang terbatas dan tingkat kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan yang masih minim. Melalui inovasi ini, jemput bola yang dilaksanakan rutin ke sekolah-sekolah dapat mengatasi kendala tersebut. Anak-anak dengan mudah terlayani dan dilayani di sekolah.



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Dimana penyelenggaraan pelayanan Inovasi " Kaledo Gratis " yaitu dengan melakukan pelayanan jemput bola dengan menghadirkan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak berusia dibawah 17 tahun yang sebelumnya melakukan koordinasi kepada pihak/pimpinan sekolah. Tahapan dari pelaksanaan Inovasi KALEDO GRATIS, sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi laporan perekaman dan penerbitan KIA, KTP dan Akta Kelahiran 2. Rapat koordinasi intern pembahasan evaluasi penerbitan dokumen kependudukan pada anak 3. Konsultasi dengan Wali Kota terkait kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palu dan Provinsi Sulteng 4. Rapat koordinasi lintas sektor terkait percepatan pelayanan di sekolah 5. Kunjungan koordinasi dengan Disdukcapil Prop.Sulteng terkait fasilitasi koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng 6. Rapat koordinasi lintas sektor terkait penyusunan draf SK Tim, SOP serta persiapan pelatihan Inovasi KALEDO GRATIS 7. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan inovasi KALEDO GRATIS bagi tim pelaksana 8. Kunjungan ke sekolah-sekolah terkait pelaksanaan jadwal KALEDO GRATIS
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Anak Lahir Pulang Bawa Akta Lahir, Masyarakat Aman Akta Penting (ALPUKAT MANTAP)	Akte kelahiran merupakan bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Selain itu sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Hak identitas bagi seorang anak diamanatkan juga dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang menetapkan capaian nasional kepemilikan akte kelahiran sebesar 90 %. Namun sampai dengan tahun 2020 cakupan



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun di kota palu masih dibawah target nasional yaitu 82,81% Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan percepatan pelayanan kepemilikan akta kelahiran agar dapat terpenuhi target nasional dari capaian kepemilikan akta kelahiran dengan melakukan inovasi "ALPUKAT". Inovasi ALPUKAT merupakan kepanjangan dari Anak Lahir Pulang Bawa Akta, Inovasi ini merupakan wujud dari implementasi Permendagri No 9 tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan kepemilikan Akta Lahir. Inovasi ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palu dalam membahagiakan masyarakat dan melindungi hak identitas bagi anak. Pelayanan inovasi "ALPUKAT" (Anak Lahir Pulang bawa Akta) dilakukan dengan Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak serta puskesmas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan cepat bagi masyarakat yaitu penerbitan Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Kartu Identitas Anak yang diberikan pada saat anak lahir baik itu di Rumah sakit maupun puskesmas, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kantor Dukcapil. Inovasi Alpukat ini, diuji coba tahun 2020 dengan melibatkan dua puskesmas dan satu Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), namun pelayanan yang dilaksanakan masih secara manual, petugas di RS dan Puskesmas datang mengambil dan mengantar berkas. Namun seiring berkembangnya teknologi, maka sejak tahun 2021, inovasi ini telah menggunakan aplikasi ALPUKAT sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan. Dan inovasi ini telah ditetapkan melalui keputusan Walikota, yang bertujuan agar inovasi ini tetap berlanjut dan terus berkembang. Melalui aplikasi alpukat, Petugas puskesmas dan RSIA dapat langsung menginput berkas dan menerbitkan dokumen kependudukan di tempatnya masing-masing. Inovasi alpukat, saat ini terus melaksanakan pengembangan yaitu memperluas area pelayanannya keseluruh puskesmas kota Palu dan Rumah Sakit bersalin. Sehingga diharapkan pelayanan penerbitan dokumen



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			kependudukan bagi ibu hamil dan melahirkan dapat langsung di semua area pelayanan kesehatan. Tahapan dari pelaksanaan Inovasi ALPUKAT MANTAP, sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi capaian kepemilikan Akta Kelahiran melalui DKB semester 2 Tahun 2021 2. Melanjutkan ide inovasi hasil kerja sama pada beberapa RS/Puskesmas di wilayah Kota Palu 3. Koordinasi dengan pimpinan RS/Puskesmas dalam rangka perpanjangan kerja sama inovasi ALPUKAT MANTAP 4. Rapat koordinasi penyusunan SK Tim, SOP serta persiapan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan Inovasi ALPUKAT MANTAP 5. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan inovasi ALPUKAT MANTAP
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan yang Bersih, Gratis dan Praktis (KASIKU BERGERAK)	Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bahwa untuk setiap Kabupaten/Kota diupayakan untuk segera meningkatkan target pencapaian cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun. target nasional pencatatan sipil sesuai dengan target RPJMN 2020 -2024 yaitu akta kelahiran tahun 2020, 93 %, 2021 95%, 2022, 97%, 2023, 98% dan di tahun 2024, 100%. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh kabupaten/ kota secara nasional untuk mencapai target tersebut. Pemerintah kota palu. Melalui Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan cakupan akta kelahiran seperti sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan jemput bola di beberapa lokasi pelayanan publik dan di tahun 2019 telah membuat inovasi ALPUKAT (Anak Lahir pulang Bawa Akta). Dimana inovasi ini menjadi energy terbesar dalam peningkatan cakupan akta kelahiran karena fokusnya adalah pemenuhan anak baru lahir dengan lokus Rumah Sakit dan Puseksmas.tentunya sejalan dengan perkembangan dan tingkat kebutuhan yang tinggi akan pentingnya dokumen kependudukan khususnya akta lahir bagi



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			seorang anak, maka tidaklah cukup pelayanan hanya di buka di RS dan Puskesmas. Sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kota Palu 2021-2024 yaitu Birokrasi yang professional yang siap melayani, dimana program prioritas pemerintah yaitu menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bulan maret tahun 2021 telah membuat inovasi yang menggunakan aplikasi yang sama dengan ALPUKAT di semua kelurahan di Kota Palu dengan nama " KASIKU BERGERAK ". Inovasi "KASIKU BERGERAK" singkatan dari Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan yang Berinovasi, Gratis dan Praktis. Inovasi ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah kota palu untuk mendekatkan pelayanan khususnya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak 0-17 tahun). Inovasi ini dihasilkan melalui evaluasi pencapaian dari upaya ALPUKAT dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dimana pada Tahun 2022 cakupan akta kelahiran 94,86% dan target ditahun 2022 adalah 95%. Pelayanan Inovasi "KASIKU BERGERAK" menjalin kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan Lurah sekota Palu dalam menghadirkan pelayanan dokumen kependudukan pada kantor kelurahan dengan menggunakan aplikasi verifikasi dan penerbitan dokumen kependudukan ditempat. Hal ini dilakukan sebagai komitmen dari pemerintah daerah untuk selalu hadir dalam memberikan pelayanan prima Tahapan dari pelaksanaan Inovasi KASIKU BERGERAK, sebagai berikut: 1. Rapat koordinasi terkait penyelarasan Visi Misi Pemerintah Kota Palu 2021-2024 2. Rapat koordinasi intern pembahasan percepatan pelayanan berdasarkan visi misi Wali Kota terpilih 3. Rapat koordinasi dengan seluruh Lurah terkait penyusunan Tim dan penyiapan operator di kelurahan 4. Sosialisasi dan pelatihan operator KASIKU BERGERAK



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			5. Pembentukan Grup WA untuk koordinasi teknis pelaksanaan dan penyusunan SOP KASIKU BERGERAK 6. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait inovasi KASIKU BERGERAK
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Layanan Mobile Pernikahan Dukcapil dengan KUA Se-Kota Palu (LAMAR AKU)	Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah secara administratif terbagi atas delapan kecamatan, sehingga KUA (Kantor Urusan Agama) juga terdiri dari delapan wilayah. Dengan adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dan penentuan status anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan liar. Sehingga dengan jelasnya status tersebut akan memperjelas pula status hukum mereka terhadap wali nikahnya nanti dan status harta warisan yang ada. Penting untuk memperhatikan hukum perkawinan termasuk pencatatan perkawinan. Hal ini dikarenakan masih banyak didapati pasangan yang hidup dalam satu atap tapi tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan. Pembuktian dari pasangan yang tidak memiliki buku nikah ini dapat dilihat pada Kartu Keluarga, dalam kartu keluarga pada kolom status ditemukan status pernikahannya tertulis kawin tidak tercatat. Kenyataan yang tengah dihadapi saat ini adalah maraknya pernikahan yang tidak tercatat. Hal ini diakibatkan tidak adanya sanksi hukum terhadap mereka yang hidup berumah tangga, tetapi tidak tercatat. Peristiwa perkawinan tidak tercatat akan menghambat sistem pencatatan lainnya seperti penerbitan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Dokumen kependudukan merupakan hak yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat baik anak-anak sampai dengan para orang tua tanpa harus membedakan gender, namun juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sehingga dilakukanlah inovasi LAMAR AKU yang bertujuan untuk membahagiakan dalam menghasilkan



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			pelayanan yang profesional untuk semua kalangan masyarakat . Inovasi LAMAR AKU hadir untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Daerah harus hadir didalam memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Waktu uji coba pelaksanaan inovasi LAMAR AKU sejak tahun 2020 di 2 (dua) KUA. Tetapi selama Tahun 2020 masih banyak masyarakat yang belum mengetahui inovasi ini, serta KUA juga masih kurang responsive. Sehingga untuk memperkuat penerbitan dokumen kependudukan bagi calon pengantin, Disdukcapil dan KUA Se-Kota Palu melakukan kesepakatan bersama pada Tanggal 27 Desember 2021 melalui inovasi LAMAR AKU. Melalui inovasi LAMAR AKU Disdukcapil dapat langsung menerbitkan dokumen baru bagi calon pengantin yang mendaftar di KUA. Dimana dokumen yang baru terbit akan diserahkan langsung oleh petugas KUA dan/atau petugas Disdukcapil saat pernikahan berlangsung. Prosedur Pelayanan Inovasi LAMAR AKU yaitu menghadirkan pelayanan "kapan saja dan dimana saja" melalui pendaftaran pernikahan yang terjadi KUA Se-Kota bagi calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya, yang kemudian Disdukcapil yang akan menerbitkan KTP dan Kartu Keluarga baru bagi calon pengantin. Dari inovasi ini akan menerbitkan dokumen bagi calon pengantin yang menikah, dokumen tersebut bertujuan untuk membantu dan meringankan pasangan pengantin dalam pengurusan dokumen yang diperlukan setelah pernikahan, sehingga mereka tidak repot lagi bolak-balik KUA dan Disdukcapil. Tahapan dari pelaksanaan Inovasi LAMAR AKU, sebagai berikut: 1. Mengajukan MoU dengan Kementerian Agama serta KUA Se-Kota Palu. 2. Membuat kesepakatan bersama antara Disdukcapil dan Kementerian Agama serta KUA Se-Kota Palu.



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			3. Membuat petunjuk teknis terkait penerbitan dokumen kependudukan bagi calon pengantin. 4. Penandatanganan MoU dengan Kementerian Agama serta KUA Se-Kota Palu. 5. Pelaksanaan sosialisasi inovasi LAMAR AKU
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Keliling Bagi Masyarakat Rutan dan Lapas (PAKAI MASKERLA)	Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengamanatkan bahwa "Setiap penduduk mempunyai hak memiliki dokumen kependudukan", tidak terkecuali bagi para warga binaan di Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan. Sejak Juni Tahun 2022 Pemerintah Kota Palu dalam hal ini Disdukcapil Kota Palu telah bekerja sama dengan Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Kota Palu, termasuk diantaranya adalah Lapas Kelas IIA Petobo, Lapas Perempuan Palu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu, dan Rutan Kelas IIA Palu untuk melakukan pendataan, perekaman dan memberikan hak atas identitas kependudukan bagi warga binaan. Kerjasama ini merupakan wujud pemerintah sebagai satu kesatuan dalam melayani masyarakat. Pemberian dokumen administrasi kependudukan berupa KTP-EI ini juga merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Palu dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang tertib dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan sector lainnya. Selain itu tentunya warga binaan akan memerlukan identitas kependudukan untuk keperluan administrasi di dalam Lapas dan Rutan seperti remisi Saat ini seluruh aktifitas pelayanan publik, alokasi anggaran, pesta demokrasi, bahkan pencegahan tindak criminal telah



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			menggunakan data kependudukan yang berasal dari Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kehadiran Dukcapil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi semua pihak. Ada banyak warga binaan di Rutan dan Lapas yang tidak memiliki atau kehilangan KTP-EI, sehingga Disdukcapil Kota Palu melakukan mobile di rutan dan lapas yaitu perekaman KTP-EI, penerbitan KTP-EI, Akta Lahir, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak bagi anak dibawah 17 tahun. Dimana penyelenggaraan pelayanan Inovasi " Pakai Maskerla " yaitu dengan melakukan pelayanan jemput bola dengan menghadirkan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Rutan dan Lapas sebelumnya melakukan koordinasi kepada pihak rutan dan lapas. Tahapan dari pelaksanaan Inovasi PAKAI MASKERLA, sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi laporan perekaman dan penerbitan KK, KIA, KTP dan Akta Kelahiran 2. Rapat koordinasi intern pembahasan evaluasi penerbitan dokumen kependudukan bagi warga binaan 3. Konsultasi dengan Wali Kota terkait kerja sama dengan Pihak Rutan dan Lapas 4. Rapat koordinasi lintas sektor terkait percepatan pelayanan di rutan dan lapas 5. Kunjungan koordinasi dengan Disdukcapil Prop.Sulteng terkait fasilitasi koordinasi dengan Pihak Rutan dan Lapas 6. Rapat koordinasi lintas sektor terkait penyusunan draf SK Tim, SOP serta persiapan pelatihan Inovasi PAKAI MASKERLA 7. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan inovasi PAKAI MASKERLA bagi tim pelaksana 8. Kunjungan ke rutan dan lapas terkait pelaksanaan inovasi PAKAI MASKERLA
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Terintegrasi Di Kecamatan (PELANGI DI KECAMATAN)	Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah secara administratif terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Secara geografis Kota Palu terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu, yang wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah,



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			sungai, teluk dan lautan. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri kepada masyarakat didalam mengakses pelayanan, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Untuk memenuhi hak dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukanyang telah di ubah ke Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 2 dan pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat maka perlu mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien, dengan mendekatkan pelayanan pada setiap kecamatan. Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh pemerintah kota palu melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu dengan membentuk Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, namun hal ini membutuhkan prosedur yang panjang dan akan mengakibatkan pembebanan anggaran daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah kota palu melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengambil langkah strategis dengan menciptakan inovasi "PELANGI DIKECAMATAN" yaitu menghadirkan pelayanan dokumen kependudukan pada setiap kecamatan. Inovasi ini memiliki fungsi yang sama dengan UPTD namun dapat segera di implementasikan dan tidak membutuhkan anggaran yang besar. Pelaksanaan inovasi "PELANGI DIKECAMATAN" menjalin kerja sama dengan para camat yaitu membuka loket pelayanan pada kantor kecamatan dengan menempatkan operator dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga masyarakat dapat terpenuhi haknya dengan memperoleh



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			dokumen kependudukan serta diberikan kemudahan untuk mengakses pelayanan dokumen kependudukan tanpa perlu lagi datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu pada masa pandemi COVID-19 inovasi ini sangat bermanfaat karena tidak mengakibatkan penumpukan masyarakat pada kantor dinas dukcapil yang ingin membuat dokumen kependudukan. Tahapan dari pelaksanaan Inovasi PELANGI D KECAMATAN, sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi penanganan pengaduan yang masuk melalui Kotak Saran dan Layanan pengaduan 2. Rapat koordinasi intern pembahasan rencana tindak lanjut 3. Rapat koordinasi dengan Camat se- Kota Palu 4. Rapat intern penyusunan SK Tim, SOP dan penyiapan sarana dan prasarana di Kantor Camat 5. Penetapan SK Tim pelaksana Inovasi PELANGI DI KECAMATAN 6. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan inovasi PELANGI DI KECAMATAN
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Khusus Disabilitas, Orang Sakit dan lansia (PELAYAN SEKSI)	Inovasi pelayanan publik merupakan bentuk transformasi terhadap pelayanan publik guna mendapatkan solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan sehingga mendekatkan dengan harapan masyarakat. Salah satu inovasi daerah adalah inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dimana daerah diharapkan berinovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang diharapkan dapat melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat, bagi seluruh kelompok masyarakat. Pelayanan publik yang inovatif harus dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Sehubungan dengan itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menciptakan inovasi yang dapat melindungi



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			semua kelompok masyarakat baik itu disabilitas, orang sakit dan lansia. Beberapa kendala bagi pelayanan kelompok SEKSI (disabilitas, orang sakit dan lansia) dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan 1. Akses geografis (Lokasi pelayanan yang jauh, berbiaya tinggi, dan transportasi terbatas) 2. Akses informasi dan komunikasi 3. Hambatan internal diri penyandang disabilitas, orang sakit maupun lansia 4. Dan kendala khusus bagi kelompok disabilitas yaitu, Kurangnya dukungan masyarakat bagi pengembangan diri para penyandang disabilitas yang secara keseluruhan telah memperburuk akses para penyandang disabilitas ke layanan publik. Berdasarkan kendala yang dihadapi diatas, dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota palu meningkatkan area pelayanan dengan membentuk Inovasi Pelayan Seksi yang merupakan akronim dari Pelayanan Khusus Disabilitas, Orang Sakit dan Lansia, Inovasi ini memberikan kemudahan bagi kelompok seksi (Disabilitas, orang sakit dan Lansia) dengan menyediakan loket khusus di dinas tanpa nomor antrian dan berkas persyaratan yang harus lengkap. Selain itu dukcapil juga menempatkan petugas khusus mobile di lapangan bagi kelompok seksi yang terkendala datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahapan dari pelaksanaan Inovasi PELAYAN SEKSI, sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi laporan pengaduan masyarakat penduduk rentan dan masukan dari Wali Kota 2. Rapat koordinasi intern pembahasan evaluasi percepatan pelayanan bagi kelompok penduduk rentan 3. Rapat koordinasi dengan Dinas Sosial, Lurah dan Camat Se-Kota Palu terkait pelayanan mobile bagi kelompok rentan. 4. Penyiapan kontak layanan online, SOP Pelayan Seksi dan Penyusunan Draf SK Tim Pelaksana



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			5. Rapat koordinasi pelaksanaan Pelayan Seksi dengan Dinas Sosial, Lurah dan Camat se- Kota Palu 6. Pengesahan SK Tim Pelaksanaan Inovasi dan Persiapan Pelatihan Operator Tim 7. Pelaksanaan dan Pelatihan Inovasi Pelayan Seksi bagi tim pelaksana 8. Sosialisasi kepada masyarakat terkait Inovasi Pelayan Seksi Pelayan seksi yang bertugas mobile, menyiapkan kontak layanan online yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat, lurah dan camat yang ingin dikunjungi. Adapun kontak person layanan online mobile Pelayan Seksi adalah : 1. Fajarini , S.STP,M.Si (Sekretaris) No Hp 082290605400 2. Moh Kurniawan, S.Pi (Kasi Identitas Penduduk) No Hp 085399958281
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sistem Mobile Pelayanan Dokumen Kependudukan Bersih Gratis, dan Praktis (SIMALEO BERGERAK)	Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah secara administratif terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Secara geografis Kota Palu terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu, yang wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri kepada masyarakat khususnya yang berada didaerah pegunungan didalam mengakses pelayanan, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan hak yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat baik anak-anak sampai dengan para orang tua tanpa harus membedakan gender, namun juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Namun terbatasnya akses ke tempat pelayanan yang berada di pusat kota merupakan kesulitan tersendiri bagi kaum wanita dan kelompok rentan lain khususnya yang berada diwilayah pegunungan kota palu, selain itu, alasan lain dari inovasi ini adalah bagaimana dukcapil hadir ketika ada masyarakat yang berduka dan melaksanakan perkawinan, dimana



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			masyarakat cukup menghubungi layanan online kami, dan petugas dukcapil akan langsung mobile dan membwa dokumen yang dibutuhkan. Dimana dinas Dukcapil menyadari bahwa pemahaman pentingnya dokumen kependudukan bagi masyarakat masih kurang, sehingga pada umumnya masyarakat akan datang ke dukcapil ketika terbentur dengan kepentingan yang mempersyaratkan KTP-el atau dokumen kependudukan lainnya, Untuk itu inovasi SIMALEO BERGERAK mendekatkan loket pelayanan administrasi Kependudukan bagi masyarakat kota palu yang membahagiakan dalam menghasilkan pelayanan yang profesional untuk semua kalangan masyarakat . Inovasi SIMALEO GERGERAK merupakan akronim dari Sistem Mobile Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Bersih, Gratis dan Praktis. inovasi ini hadir untuk menjalankan amanat Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Daerah harus hadir didalam memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk. Prosedur Pelayanan Inovasi SIMALEO BERGERAK yaitu menghadirkan pelayanan “kapan saja dan dimana saja” melalui metode jemput bola (mobile) bagi masyarakat Kota Palu yang memiliki keterbatasan akses dalam menjangkau loket pelayanan dengan menghubungi nomor layanan yang telah disediakan. Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan jemput bola yang paling efektif dan secara luas dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan seluruh kebutuhan pelayanan dokumen kependudukan. Melalui inovasi ini, pelayanan dukcapil semakin baik, dan pemenuhan dokumen kependudukan bagi masyarakat secara luas dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari laporan pelayanan SIMALEO BERGERAK, dimana dimasa uji coba inovasi ini tahun 2020 penerbitan dokumen cukup tinggi, namun beriring waktu, di tahun 2021 penerbitan dokumen kependudukan pada saat mobile tidak begitu tinggi dan tidak terjadi penumpukan seperti di awal pelayanan



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			mobil,. Dapat digambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sudah semakin tinggi dan baik. Tahapan dari pelaksanaan Inovasi SIMALEO BERGERAK, sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi laporan pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan 2. Rapat koordinasi intern pembahasan evaluasi percepatan pelayanan terkait penerbitan dokumen kependudukan 3. Rapat koordinasi dengan lurah dan camat se- Kota Palu terkait percepatan pelayanan di wilayah masing-masing 4. Kunjungan dan koordinasi terkait penawaran mobile perkawinan ke pemuka agama non muslim 5. Rapat koordinasi pembahsan penyusunan SK Tim, SOP dan persiapan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan Inovasi SIMALEO BERGERAK 6. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan inovasi SIMALEO BERGERAK
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Sistem Percepatan Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Chatbot (SIRATUBOT)	Inovasi SIRATU BOT merupakan hasil adopsi dan replikasi dari studi lapangan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dimana dalam Memperhatikan tuntutan perkembangan dunia digital tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur turut ambil bagian dalam revolusi industri pariwisata dengan menginisiasi pembuatan platform promosi pariwisata dalam bentuk chatbot, demi mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses informasi pariwisata. Chatbot merupakan perangkat lunak atau program computer yang mampu memproses pesan seperti teks, suara, gambar dan video yang kemudian dapat memberikan respon dalam bentuk teks, gambar dan video pula. Maksud dari pembuatan chatbot ini adalah meningkatkan strategi promosi pariwisata Jawa Timur di era digital dengan memberikan kemudahan akses pelayanan informasi kepada calon wisatawan untuk mengeksplorasi potensi jawa timur. Adapun tujuan chatbot ini : sebagai pusat pelayanan informasi pariwisata, meningkatkan brand pariwisata jawa timur melalui media soSial,



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			saran menghasilkan database wisatawan potensial , menghemat waktu dan biaya. Melihat maksud dan tujuan chatbot ini, maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota palu, beranggapan bahwa inovasi ini dapat di replikasi dan dimodifikasi di kota palu, dalam rangka strategi percepatan informasi bagi administrasi kependudukan. Perkembangan teknologi digital sangatlah pesat dan tidak terbendung. Penggunaan teknologi digital mutlak diperlukan dalam segala aspek kehidupan. Memperhatikan tuntutan perkembangan dunia digital tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan transformasi digital di berbagai pelayanan kependudukan. Akan tetapi, kadang ada yang terlupakan yaitu bagaimana seluruh inovasi yang dilaksanakan dapat diketahui dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan yang ditawarkan oleh berbagai inovasi yang telah diciptakan. CHATBOT, diadopsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Jawa Timur, dengan tujuan agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan dengan media yang disiapkan. Yaitu melalui chatbot untuk membantu pemahaman dan pemberian informasi tentang administrasi kependudukan. Tentunya Chatbot yang di adopsi, akan direplikasi dengan menambahkan menu di dalam chatbot tentang pelayanan pengaduan bagi masyarakat. SIRATU BOT yaitu Strategi Percepatan Informasi Adminisitrasi Kependudukan melalui CHATBOT, di tawarkan oleh kami sebagai solusi untuk memecahkan masalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan dan prosedur administrasi kependudukan. SIRATU BOT merupakan sebuah rancangan aksi perubahan dari salah satu pejabat administrasi dilingkungan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil , dimana inovasi ini menggunakan chat otomatis, atau chat robot yang dapat merespon pesan dari masyarakat. Adapun menu yang disiapkan oleh SIRATU BOT adalah seluruh inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			dapat dimanfaatkan masyarakat, kebijakan administrasi kependudukan terkait penggunaan barcode, cetak mandiri, dokumen yang tidak perlu dileges, dan update kebijakan yang terus berkembang. Selain menu yang disediakan di atas, masyarakat juga dapat mengetahui persyaratan dan bagaimana prosedur dalam penerbitan dokumen kependudukan, bahkan kami akan menyediakan kontak layanan online terkait pengaduan dengan para pejabat teknis. SIRATU BOT ini akan memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, SIRATU BOT diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Palu. SIRATU BOT Diproyeksikan mampu menjadi kanal informasi yang dapat mendistribusikan pengetahuan, pemahaman, ide/saran tanpa batas jarak, tempat dan waktu bagi semua masyarakat dikota Palu, sehingga tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota palu dapat terwujud, sesuai tujuan yang ada di dalam Renstra 2021-2026 dan sesuai dengan visi misi Wali kota yaitu menghadirkan Birokrasi Professional Yang Selalu Siap Hadir Melayani.
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	TATOPOMU	Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkala. Sebagai salah satu sumber bahan pemenuhan data dan informasi daerah tentang perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, hasil kegiatan monitoring selanjutnya diolah kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Kota Palu. Dalam perjalanannya, kegiatan monitoring oleh Bappeda yang awalnya hanya berupa desk laporan capaian program/kegiatan, pada tahun 2014 ditambahkan dengan kegiatan monitoring program/kegiatan pembangunan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk membandingkan capaian yang ada dilaporkan dengan kondisi riil juga untuk



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			mengidentifikasi permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan pembangunan yang dapat menjadi faktor penghambat program pembangunan. Pada saat kegiatan monitoring lapangan ini kemudian didapatkan masalah yang umum terjadi yaitu : 1. Tidak adanya koordinasi antara OPD teknis pelaksana kegiatan pembangunan baik berupa fisik dan non fisik dengan Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Sehingga perangkat Kelurahan dan Kecamatan tidak memiliki informasi mengenai agenda pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya. 2. Masih ditemukan adanya program/kegiatan pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak berdampak/bermanfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada masyarakat. Padahal, tujuan utama pembangunan adalah memberikan manfaat secara menyeluruh kepada masyarakat. 3. Keterlambatan bahkan batalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan karena adanya konflik dengan masyarakat setempat yang terjadi karena kurang optimalnya proses komunikasi antara masyarakat dan OPD terkait. Yang paling sering terjadi adalah permasalahan lahan yang tidak tersedia. Menjawab permasalahan yang terjadi dalam monitoring lapangan tersebut, Bidang monitoring dan evaluasi menggagas metode pelaksanaan monitoring yang baru dengan melibatkan masyarakat dan perangkat Kelurahan dan Kecamatan dan memanfaatkan aplikasi www.laporwalikotapalu.com sebagai sarana penyampaian informasi masyarakat mengenai kendala pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan ini disebut dengan nama TATOPOMU atau Target Aksi terhadap Penyelesaian Obrolan Masyarakat Umum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa konsep baru dalam pelaksanaan monitoring adalah dengan melibatkan



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			masyarakat dalam ikut memantau pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di wilayahnya yang diawali dengan penyebaran informasi program/kegiatan yang sedang dilaksanakan melalui perwakilan tim monitoring di Kelurahan dan Kecamatan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemantauan berupa feed back yang kemudian akan disampaikan melalui tim monitoring pada saat pemantauan lapangan atau melalui www.laporwalikota.com. Inovasi monitoring ini dilakukan dengan tujuan bahwa walaupun dengan jumlah Tim Monitoring yang terbatas, monitoring dapat dilakukan dengan jangkauan lebih luas. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan pembangunan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk memastikan pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar.
12	DINAS PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ESIGA KESEHATAN TERINTEGRASI ELEKTRONIK SEKTOR SECARA	E.SIGA : Merupakan sistim pelayanan yang diciptakan Secara Elektronik atau Online. Bentuk & sistim pelayanan perizinan yang dimaksudkan untuk & menyederhanakan prosedur perizinan, memangkas sistim birokrasi pelayanan sistim pelayanan perizinan & yang cpat, tepat dan tuntas & dalam permohonan izin tanpa berbelit. pelayanan perizinan yang menjangkau & masyarakat luas & dan mudah diakses, E, SIGA & juga sebagai solusi untuk menjawab pengembangan sistim yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu teknologi informasi saat ini. E-SIGA merupakan sarana pendaftaran permohonan perizinan online yang disediakan untuk seluruh bangsa Indonesia yang ingin mengajukan permohonan izin di wilayah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. & Dengan E SIGA diharapkan masyarakat dapat menikmati pelayanan terpadu dengan lebih cepat dan lebih baik. & Dengan satu akun yang dimiliki, maka pemohon dapat memohon semua jenis permohonan E-SIGA adalah piranti lunak berbasis situs (website) yang merupakan gerbang pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui jaringan sistem elektronik yang terdiri dari : a. anjungan



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			informasi b. nomor antrian & c. pendaftaran online d. koordinasi tim teknis e. penetapan g. pembayaran h. penerbitan i. penyerahan j. pengaduan k. sms gateway dan l. kearsipan SEKTOR KESEHATAN : Sektor Kesehatan & merupakan bentuk pembaharuan & Inovasi terhadap proses permohonan izin & mulai & dari tahap pendaftaran sampai proses rekomendasi, penerbitan & izin secara elektronik atau online. PELAYANAN CEPAT, TEPAT DAN TUNTAS : Sistem ini dibangun secara elektronik atau online cepat, tepat dan tuntas & mudah diakses oleh seluruh lapisan & masyarakat & dalam mengurus izin, memberikan kemudahan & mengurus izin & diman saja, kapan saja & dapat langsung mendaftarkan izin secara online tanpa dibatasi ruang & tempat dan waktu, informasi perizinan terhadap status penyelesaian & izin serta tindakan lanjut dapat langsung diketahui melalui sistem ini. Hal ini dapat disimpulkan & makna & dari E.SIGA SEKTOR KESEHATAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK & adalah sarana sistem perizinan berbasis elektronik & online & yang mampu menjawab tantangan & perkembangan ilmu teknologi & dan tuntutan pelayanan saat ini. Pemberian akses & yang mudah, cepat, tepat dan tuntas & dalam memperoleh perizinan berusaha di daerah. Melalui Sistem E.SIGA & Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Palu & melakukan pelayanan pendampingan terhadap pendaftaran izin & secara online, pembinaan, pemantauan, serta pengawasan terhadap kemudahan perizinan di daerah, baik secara daring maupun luring. Tatanan dari Pelaksanaan E.SIGA SEKTOR KESEHATAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK & SIAP MELAYANI & CEPAT, TEPAT, DAN TUNTAS sebagai berikut: 1. Memberikan himbauan baik lisan & maupun tulisan berupa Surat Edaran & terkait INOVASI DAERAH kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah 2. Membuat format berupa petunjuk & teknis tentang & pengusulan INOVASI DAERAH kepada & setiap



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Oragnisasi Perangkat Daerah3.Melaksanakan Sosialisasi,Disksi langsung,Penyuluhan Publik kepada Masyarakat dan masing OPD terkait4.Menyiapkan Sumber daya Manusia, membentuk Tim Pelaksanan Inovasi E.SIGA SEKTOR KESEHATAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SIAP MELAYANI CEPAT,TEPAT DAN TUNTAS sebagai bentuk penguatan pelaksanaan INOVASI5.Membangun Sistim Jaringan unternet &nbsp;dengan kapasitas yang memadai.6.Pengembangan Sistim Perizinan secara Online di segala Sektor Perizinan.7.Monitoring dan Evaluasi &nbsp;terhadap Pelaksanaan Perizinan berusahaDari rencana dan rancang bangun di atas, maka dapat disimpulkan &nbsp;bahwa poko perubahan yang menjadi inovasi &nbsp;membawa perubahan mindset dan kulturset pola pikir masyarakat terhadap perkembangan ilmu tehnologi, peran &nbsp;serta masyarakat. &nbsp;Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih pro aktif &nbsp;dalam Pengembangan INOVASI DAERAH.
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI (SIMPEG)	Seperti yang diketahui bahwa berkembangnya teknologi informasi di pengaruhi oleh tingginya kebutuhan akan teknologi yang menyediakan informasi secara akurat, efektif dan efisien. Dengan berkembangnya teknologi komputer tentunya mempengaruhi kinerja manusia sebagai sistem informasi yang berbasiskan komputer semakin meningkat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu (DISDIKBUD) merupakan suatu bagian dari instansi pemerintahan di Kota Palu Sulawesi Tengah.&nbsp; Saat ini pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memiliki total Pegawai bersatatus PNS dan Non PNS/Honorer sebanyak 5799. Mengingat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), berdasarkan dengan maksud pada pasal 1 Ayat (8) yang berbunyi :&nbsp;"Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian".&nbsp; Atas dasar regulasi tersebutlah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memiliki kewajiban yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Pendataan kepegawaian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sudah berjalan dengan optimal namun memiliki beberapa kekurangan, contohnya pengolahan data para pegawai belum tertata rapi dalam sebuah database, sehingga dalam mengolah data para pegawai seperti penginputan, pencarian, dan perubahan data kurang teratur dengan baik dan memakan waktu yang lebih banyak. Bagi para pegawai sendiri ketika ingin mengakses informasi yang dibutuhkan maka mereka harus menemui langsung ke bagian yang menangani kepegawaian serta apabila ada perubahan terkait data misalnya terjadi perubahan kenaikan pangkat atau daftar urut kepangkatan maka pegawai tidak dapat mengecek secara cepat apakah data tersebut sudah benar atau tidak. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu mengolah data para pegawai dan memudahkan dalam mengakses informasi terkait yang diperlukan, serta dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) berbasis web ini akan memudahkan pegawai dalam mencetak laporan secara otomatis terkait informasi dari data pegawai baik berupa data pegawai itu sendiri, data kenaikan pangkat serta Kenaikan gaji berkala secara cepat dimanapun berada dengan hanya mengakses sistem informasi kepegawaian berbasis web tersebut. Saat ini sudah banyak pengguna yang mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) sebagai penunjang kebutuhan teknologi informasi. Untuk itu diharapkan dengan adanya sistem informasi manajemen pegawai ini mampu



No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			membantu kinerja para pegawai secara cepat dan otomatis. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan "Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Data Pegawai PNS dan Non PNS pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Berbasis Web". Sistem informasi Manajemen Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu diharapkan mampu memudahkan staff bagian kepegawaian yang menangani data para pegawai agar pengelolaanya menjadi teratur, efektif dan efisien. Sedangkan untuk pegawai dapat memudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dimanapun karena sudah berbasis Web, selain itu juga dengan sistem ini maka para pegawai dapat mencetak laporan terkait. Serta memudahkan Kepala Bagian untuk mengawasi secara langsung terkait data para pegawainya.